

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN APLIKASI GUNA BINAAN OLEH PENGAWAS SEKOLAH DAERAH PERBATASAN INDONESIA - MALAYSIA

Damianus Budi Prasetya
Universitas Tanjungpura, Jl. Prof. Dr. Hadari Nawawi, Pontianak

Corresponding author: budiprasetya827@gmail.com

ABSTRACT

Human life over time has been greatly influenced by technological advancements. With the progress of knowledge and technology, humans have been able to create various tools that make tasks more effective and efficient. This is especially evident in the field of education. Various technological developments are utilized in education to assist teachers and other stakeholders working in this domain. The rapidly evolving technology has made it easier for individuals to access specific information, a fact recognized by a school supervisor working in a border region between Indonesia and Malaysia. To aid all teachers under their supervision, the supervisor developed an Android-based application. This development prompted researchers to conduct a study to investigate the implementation of the Guna Binaan application policy, examining it within the theoretical framework of policy and exploring its benefits for teachers who implement this policy. The research methodology employed by the researchers is qualitative descriptive research. This type of research aims to describe the condition and status of a phenomenon using words or sentences, which are then categorized based on the data to draw conclusions. Based on the data collected through interviews with informants and policy implementation analysis conducted with reference to education policy experts' theories, it can be concluded that the Guna Binaan application policy has been successful. The policy was executed in line with policy theories, employing five key components of a well-designed education policy: goals, plans, programs, decisions, and impacts. These five components are interconnected and support one another.

Keywords: *application, policy, technology,*

Diterima: 16 Oktober 2023, Revisi: 5 Desember 2023, Dipublikasikan: 28 Desember 2023

ABSTRAK

Kehidupan manusia seiring berjalannya waktu sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia telah mampu menciptakan berbagai alat yang membuat tugas menjadi lebih efektif dan efisien. Hal ini terutama terlihat dalam bidang pendidikan. Berbagai perkembangan teknologi dimanfaatkan dalam dunia

pendidikan untuk membantu guru dan pemangku kepentingan lainnya yang bekerja di bidang ini. Teknologi yang berkembang pesat memudahkan individu dalam mengakses informasi tertentu, hal ini diakui oleh seorang pengawas sekolah yang bekerja di wilayah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Untuk membantu seluruh guru yang dibimbingnya, pengawas mengembangkan aplikasi berbasis Android. Perkembangan tersebut mendorong peneliti untuk melakukan kajian untuk menyelidiki implementasi kebijakan penerapan Guna Binaan, mengkajinya dalam kerangka teori kebijakan dan menggali manfaatnya bagi guru yang menerapkan kebijakan tersebut. Metodologi penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi dan status suatu fenomena dengan menggunakan kata-kata atau kalimat, yang kemudian dikategorikan berdasarkan data untuk diambil kesimpulan. Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui wawancara dengan informan dan analisis implementasi kebijakan yang dilakukan dengan mengacu pada teori para ahli kebijakan pendidikan, dapat disimpulkan bahwa penerapan kebijakan Guna Binaan telah berhasil. Kebijakan tersebut dilaksanakan sejalan dengan teori kebijakan, dengan menggunakan lima komponen utama dari kebijakan pendidikan yang dirancang dengan baik: tujuan, rencana, program, keputusan, dan dampak. Kelima komponen ini saling berhubungan dan mendukung satu sama lain.

Kata kunci: *kebijakan, teknologi, penerapan*

PENDAHULUAN

Berlangsungnya kehidupan manusia dari waktu ke waktu sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Dengan berkembangnya pengetahuan dan teknologi, manusia dapat membuat berbagai alat yang membuat pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien. Hal tersebut tidak terkecuali terjadi dalam bidang pendidikan. Berbagai hasil perkembangan teknologi dimanfaatkan dalam bidang pendidikan untuk membantu para guru dan peran lain yang bekerja di bidang ini.

Terdapat berbagai hasil teknologi yang telah memberikan manfaat bagi kemajuan bidang pendidikan. Hasil yang ditemukan melalui perkembangan pengetahuan dan teknologi seperti pembuatan kertas dan mesin cetak merupakan contoh penemuan yang telah memberikan manfaat besar bagi dunia pendidikan. Namun hasil perkembangan teknologi yang paling berdampak bagi kemajuan dunia pendidikan adalah penemuan-penemuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah suatu perangkat teknologi yang memfasilitasi penggunaannya dengan berbagai kemudahan dalam mengakses informasi yang dibutuhkan. Baik berupa informasi yang disajikan dalam bentuk suara, tulisan, visual, maupun dalam bentuk simbol atau lambang-lambang informasi lainnya (Prawiradilaga, 2013).

Teknologi informasi dan komunikasi adalah hasil perkembangan sistem informasi yang menggabungkan teknologi sistem komputer dengan telekomunikasi. Dewasa ini,

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dapat dilihat hasilnya dengan munculnya berbagai aplikasi komputer yang digunakan dalam berbagai sistem informasi yang digunakan di dunia pendidikan. Beragam informasi yang merupakan unsur penting dalam bidang pendidikan di berbagai instansi dikelola menggunakan aplikasi komputer (Baharudin, 2010). Penggunaan teknologi informasi saat ini sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia setiap hari. Penggunaan teknologi informasi sudah menjadi kebutuhan yang sangat mendasar bagi semua orang. Teknologi yang semakin berkembang memudahkan seseorang untuk mengakses informasi tertentu (Rahayu et al., 2022). Hal ini dipahami oleh seorang pengawas sekolah tingkat SMP yang bertugas di daerah perbatasan negara Indonesia – Malaysia, tepatnya di kabupaten Sanggau yang mencakup kecamatan Sekayam, Beduai, Noyan dan Entikong. Ia mengembangkan sendiri sebuah aplikasi komputer berbasis android sebagai satu bentuk teknologi informasi untuk memudahkan tugas kedinasannya.

Pengawas Sekolah yang dimaksud di atas adalah, Suharna, S.Pd. Pengawas Sekolah tingkat SMP yang bertugas di daerah perbatasan negara Indonesia – Malaysia ini memiliki ide kreatif dengan mengembangkan aplikasi bernama Guna Binaan agar memudahkan tugas pembinaan bagi guru-guru SMP di bawah binaannya. Ia menghadapi tantangan di dalam menjalankan tugasnya dimana masih banyaknya guru yang belum berusaha mengeksplorasi kemampuannya dalam menyiapkan dan menyusun perangkat pembelajaran yang sesuai dan dibutuhkan dalam proses mengajar. Selain itu, keadaan geografis daerah binaannya di perbatasan negara Indonesia – Malaysia yang relatif luas dan kondisi akses jalan yang banyak masih belum diaspal menyulitkan peran pengawas sekolah untuk mengunjungi sekolah binaan secara intensif. Hal ini yang mendorongnya membuat kebijakan untuk semua guru di bawah binaannya menggunakan aplikasi Guna Binaan dan mengunggah semua perangkat pembelajaran dari mata pelajaran yang diajarkan sehingga memudahkannya menjalankan peran pengawas dalam melakukan supervisi pelaksanaan standar proses di sekolah-sekolah. Pada awal masa penerapan kebijakan ini, ada usaha-usaha persiapan yang ia lakukan karena tantangan-tantangan yang ada dimana ia harus membimbing guru-guru dalam menggunakan aplikasi Guna Binaan. Namun berjalannya waktu, kebijakan ini memberikan manfaat bagi peran pengawas dan guru binaan. Peran pengawas menjadi lebih efektif dalam menjalankan tugas pembinaan sebab data-data guru tersimpan dalam basis data aplikasi, serta memberi manfaat bagi guru-guru dalam melaksanakan tugas mengajar sebab dari data yang telah diunggah, guru-guru mendapat masukan dan arahan dari pengawas pembina. Hal tersebut yang mendorong peneliti melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan aplikasi Guna Binaan dengan melihat kerangka teori tentang kebijakan, dan apa dampak manfaat bagi guru-guru pelaksana kebijakan ini.

METODE

Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif. Jenis penelitian kualitatif deskriptif merupakan suatu analisis yang memiliki

tujuan menggambarkan keadaan dan status suatu fenomena yang dideskripsikan melalui kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan berdasarkan kategori datanya untuk menarik kesimpulan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan realitas empiris menurut fenomena secara rinci dan menyeluruh, serta mengungkapkan gejala secara kontekstual secara holistik melalui pengumpulan data dari setting alam dengan memanfaatkan peneliti sendiri sebagai instrumen kunci (Sugiyono, 2015). Bentuk penelitian ini menggunakan data pendukung (sekunder) berupa referensi, buku serta berbagai data yang diunduh dari aplikasi terkait. Sedangkan data primer diperoleh dari wawancara yang menghasilkan data subjek utama (*key informan*) dari penelitian ini yaitu Pengawas sekolah serta ditambah informasi data dari beberapa Guru binaan. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang dilalui terbagi dalam tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Sesuai dengan judul, penelitian ini diadakan di daerah perbatasan negara Indonesia – Malaysia tepatnya kabupaten Sanggau, provinsi Kalimantan Barat yang memuat kecamatan Sekayam, Noyan dan Entikong. Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei 2023. Kebijakan penggunaan aplikasi Guna Binaan yang dibuat oleh peran Pengawas sekolah tingkat SMP cukup berhasil diimplementasikan bagi guru-guru di sekolah binaan sehingga peneliti tertarik untuk melakukan analisis proses implementasinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan dalam Bidang Pendidikan

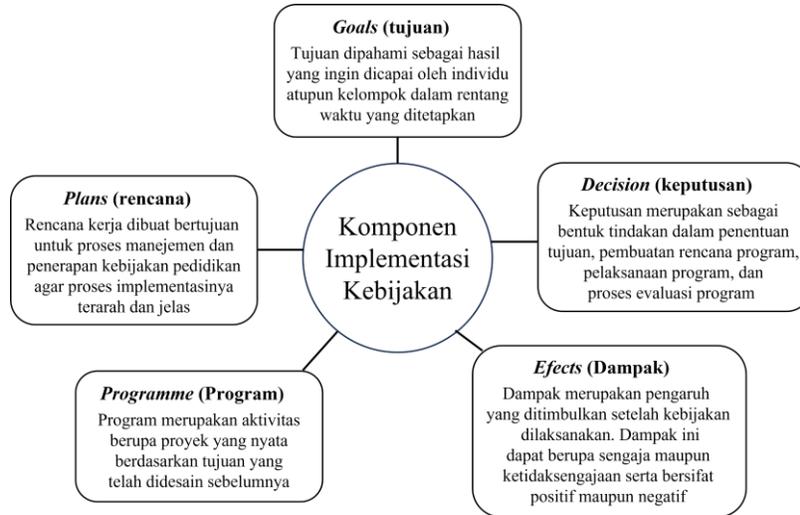
Pengambilan kebijakan adalah suatu bagian dari aktivitas politik yang dilakukan dengan berlandaskan pemikiran yang cermat dan terarah, serta dilakukan dalam suatu organisasi, lembaga maupun instansi pemerintah untuk memecahkan permasalahan sehingga dihasilkan keputusan yang sesuai dengan tujuan (Risnawan, 2015). Dalam setiap bidang kehidupan, memiliki bentuk kebijakan masing-masing yang menjadi pedoman dalam menjalankan aktivitas serta membatasi perilaku agar lebih terarah dan berorientasi pada menjawab masalah. Konsep kebijakan seperti ini juga berlaku pada dunia pendidikan yang dikenal dengan istilah kebijakan pendidikan.

Suatu kebijakan pendidikan pada hakikatnya diambil karena terdapat masalah-masalah yang terjadi dalam bidang pendidikan (Sutapa, 2008). Sedangkan menurut Fatkurozi yang dimaksud kebijakan pendidikan adalah sebuah aktivitas untuk menentukan langkah serta prosedur penyelenggaraan pendidikan dengan menguraikan visi dan misi pendidikan sehingga tercapai tujuan pendidikan (Fatkuroji, 2017). Bakry juga berpendapat bahwa kebijakan pendidikan adalah suatu kebijakan publik yang diambil dalam bidang pendidikan dan berkaitan dengan berbagai sumber daya dalam pendidikan serta pengendalian perilaku dalam lingkup pendidikan (Bakry, 2010). Selain itu, Riant berpendapat bahwa kebijakan pendidikan adalah suatu yang berkaitan dengan usaha efisiensi dan pengefektifan anggaran pendidikan (Nugroho, 2008). Berdasarkan pendapat para pakar di atas, maka dapat

disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan merupakan kebijakan yang diambil dalam bidang pendidikan sebagai usaha efisiensi dan pengefektifan program pendidikan sehingga tercapai tujuan pendidikan melalui langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan pendidikan.

Komponen Kebijakan Pendidikan

Pakar kebijakan pendidikan Charles O. Jones mengemukakan pendapat bahwa terdapat 5 komponen dalam pengambilan kebijakan pendidikan sebagaimana dinyatakan dalam gambar berikut:

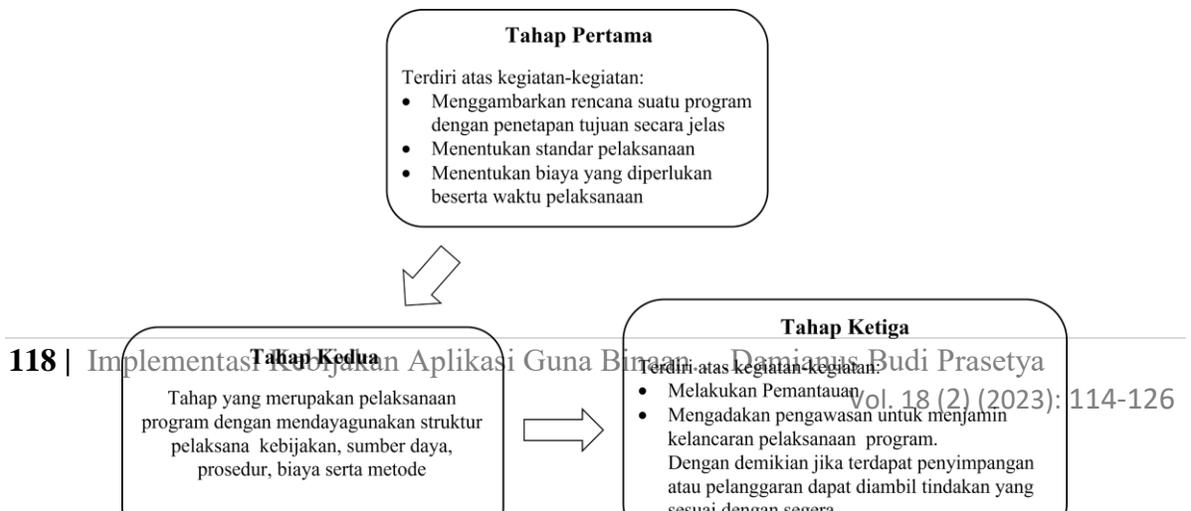


Gambar 1. Komponen Implementasi Kebijakan
Sumber: Didesain Peneliti

Menurut Charles O. Jones, lima komponen di atas membentuk sebuah kebijakan pendidikan. Tanpa adanya salah satu dari komponen tersebut maka kebijakan pendidikan tidak akan berjalan dengan baik. Kelima komponen ini saling berhubungan dan mendukung satu dengan yang lainnya (Elwijaya et al., 2021).

Tahap-tahap Implementasi Kebijakan

Agar implementasi kebijakan yang dilakukan menjadi efektif, maka perlu dijalankan dengan tahap-tahap tertentu. Solichin Abdul Wahab dalam bukunya yang berjudul Analisis kebijakan, mengutip pendapat Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn mengenai tahap-tahap implementasi kebijakan seperti dinyatakan dalam gambar bagan berikut (Wahab, 2005):



Gambar 2. Tahap Implementasi Kebijakan
Sumber: Didesain Peneliti

Peranan Teknologi Informasi dalam Dunia Pendidikan

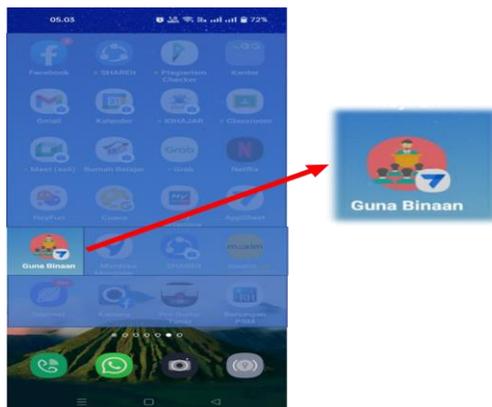
Secara etimologi, teknologi informasi berasal dari dua unsur kata yakni teknologi dan informasi. Teknologi berasal dari kata *technology* (Inggris) dengan akar kata berasal dari bahasa Yunani *techne* yang memiliki makna seni, kerajinan, atau keterampilan, dan *logia* yang memiliki makna studi atau ilmu pengetahuan. Secara terminologis, teknologi merupakan pengetahuan untuk membuat sesuatu (Yaumi, 2018). Bambang Hendro Sunarminto juga berpendapat bahwa teknologi dapat dipahami sebagai hasil karya manusia untuk membantu memecahkan masalah yang dihadapi atau mempermudah pekerjaan manusia sehingga mampu mengoptimalkan hasil kerja manusia. Sedangkan informasi yaitu data yang telah diolah menjadi bentuk yang berarti bagi pengguna, yang digunakan pada saat pengambilan keputusan saat ini atau mendukung sumber informasi (Sunarminto, 2015). Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian teknologi informasi adalah suatu alat hasil karya manusia yang dapat digunakan untuk membantu dalam mencari informasi, mengelola informasi ataupun menyampaikan informasi kepada seseorang atau masyarakat luas yang bermanfaat sebagai ilmu pengetahuan ataupun untuk dasar mengambil suatu keputusan.

Aplikasi Guna Binaan sebagai Teknologi Informasi Pendidikan

Aplikasi Guna Binaan merupakan aplikasi yang bekerja dalam sistem operasi Android dan dapat dipasang di telepon pintar (gawai). Aplikasi ini digunakan sebagai alat bantu penyimpanan dokumen secara *online*. Suharna, S.Pd., seorang Pengawas SMP di daerah perbatasan negara Indonesia – Malaysia, kabupaten Sanggau membuat kebijakan bagi semua guru binaanya menggunakan aplikasi ini sebagai sarana pelaksanaan program kepengawasan dan pembinaan guru-guru. Semua guru binaan harus mengunggah perangkat pembelajaran yang terdiri atas Program Tahunan (Prota), Program Semester (Prosem), Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) melalui aplikasi Guna Binaan. Dalam menjalankan implementasi kebijakan ini, peran Pengawas juga membuat grup *whatsapp* untuk semua guru di bawah binaannya sebagai sarana komunikasi penghubung antara peran pengawas dan guru binaan dan antar guru binaan. Dalam aplikasi Guna Binaan, para guru dan pengawas dapat melihat perkembangan jumlah guru yang telah mengunggah

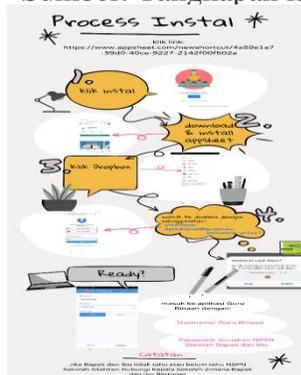
perangkat pembelajaran secara kolektif per sekolah maupun per individu sehingga peran pengawas dapat mengingatkan sekolah-sekolah yang tingkat kemajuan pengunggahannya masih rendah melalui grup *whatsapp* guru binaan.

Berikut ini beberapa gambar tangkapan layar dari aplikasi Guna Binaan:



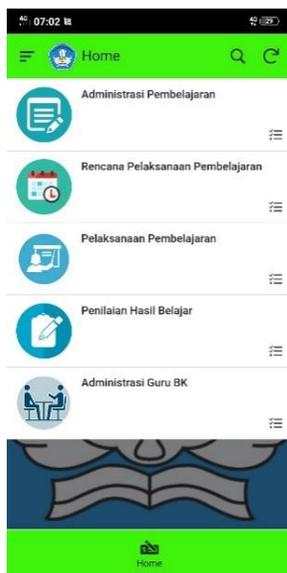
Gambar 3. Tampilan ikon aplikasi Guna Binaan

Sumber: Tangkapan layar



Gambar 4. Petunjuk pemasangan aplikasi Guna Binaan

Sumber: Tangkapan layer



Gambar 5. Contoh tampilan menu aplikasi Guna Binaan
 Sumber: Tangkapan layar

Progres Daftar Guru Binaan ☆ 🔄 📄

File Edit Tampilan Sisipkan Format Data Alat Ekstensi Bantuan

🖨️ 🔍 65% 👁️ Hanya lihat

K11

	A	B	C	D	E	F	G
1	JUMLAH GURU YANG SUDAH MENDOWNLOAD, MENGGISI DAN MENGIRIM (DATA, PROTA, PROSEM, SILABUS DAN RPP) MELALUI APLIKASI GURU BINAAN						
2	Persentase Jumlah Guru Yang Telah Mengirim						
3	No	Nama SMP	Jumlah Guru	Program Tahunan	Program Semester	Silabus	RPP
4	8	SMPIT AL-HAZZA	3	33.33	33.33	33.33	66.67
5	15	SMP NEGERI 05 SATAP ENTIKONG	6	100.00	100.00	100.00	83.33
6	5	SMP NEGERI 5 SEKAYAM	10	90.00	90.00	90.00	80.00
7	7	SMP PGRI BALAI KARANGAN	6	0.00	0.00	0.00	0
8	9	SMP AL-MUALLIMIN	8	100.00	100.00	100.00	87.5
9	2	SMP NEGERI 2 SEKAYAM	10	80.00	80.00	80.00	80
10	4	SMP NEGERI 4 SEKAYAM	11	72.73	81.82	72.73	81.81818182
11	12	SMP NEGERI 2 ENTIKONG	12	75.00	66.67	66.67	33.33
12	14	SMP NEGERI 4 SATAP ENTIKONG	10	80.00	70.00	80.00	80.00
13	16	SMP NEGERI 1 NOYAN	13	76.92	76.92	76.92	69.23
14	6	SMP NEGERI 6 SATU ATAP SEKAYAM	10	100.00	100.00	90.00	100
15	17	SMP NEGERI 2 NOYAN	11	100.00	100.00	100.00	100.00
16	3	SMP NEGERI 3 SEKAYAM	11	90.91	90.91	90.91	81.82
17	13	SMP NEGERI 3 ENTIKONG	14	100.00	100.00	100.00	100.00
18	10	SMP KRISTEN BUKIT PENGHARAPAN	14	92.86	85.71	100.00	100.00
19	11	SMP NEGERI 1 ENTIKONG	18	100.00	94.44	100.00	83.33
20	1	SMP NEGERI 1 SEKAYAM	32	68.75	68.75	65.63	62.50
21	JUMLAH GURU YANG SUDAH MENGIRIM		199				
22	Rata-rata (dalam %)			80,03	78,74	79,19	75,85

Gambar 6. Contoh rekapitulasi kemajuan hasil pengiriman data
 Sumber: Tangkapan layar

Proses Penentuan Kebijakan Aplikasi Guna Binaan

Penentuan kebijakan penggunaan aplikasi Guna Binaan dilatarbelakangi oleh masih banyaknya guru yang belum berusaha mengeksplorasi kemampuannya dalam menyiapkan dan menyusun perangkat pembelajaran yang sesuai dan dibutuhkan dalam proses mengajar. Selain itu, keadaan geografis daerah cakupan binaan Pengawas SMP daerah perbatasan negara Indonesia – Malaysia di kabupaten Sanggau yang terdiri dari kecamatan Sekayam, Noyan dan Entikong yang cukup luas dengan kondisi akses jalan yang banyak masih belum diaspal menyulitkan peran pengawas sekolah untuk mengunjungi sekolah binaan secara intensif. Hal ini menjadi motivasi bagi peran pengawas sekolah untuk mengembangkan aplikasi Guna Binaan sebagai sarana pelaksanaan tugas pembinaan guru di wilayah tugasnya dan mewajibkan semua guru binaannya menggunakan aplikasi tersebut.

Dalam penentuan kebijakan yang akan diambil, peran pengawas sekolah sebagai pengambil kebijakan mempertimbangkan beberapa hal agar kebijakan yang diambil dapat efektif dan efisien. Hal tersebut dipaparkan melalui hasil wawancara peneliti dengan peran pengawas sekolah berikut, di antaranya adalah:

Kebijakan penggunaan aplikasi Guna Binaan ini diambil dengan tujuan untuk mengatasi masalah yang dihadapi pengawas sekolah dalam pelaksanaan tugas kepengawasan dan pembinaan, yaitu banyaknya guru yang belum berusaha mengeksplorasi kemampuannya dalam menyiapkan dan menyusun perangkat pembelajaran. Selain itu wilayah cakupan sub rayon 08 ini sangat luas dan kondisi jalannya kurang kondusif untuk pengawas mengadakan kunjungan ke sekolah-sekolah binaan secara intensif. Hal ini yang mendorong saya mengembangkan aplikasi Guna Binaan agar menjadi sarana penunjang pelaksanaan tugas saya. (Wawancara PS 1)

Dalam implementasi kebijakan penggunaan aplikasi Guna Binaan, peran Pengawas Sekolah mengambil langkah-langkah untuk menunjang keberhasilan implementasi kebijakan yang dibuat. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan peran pengawas seperti yang dipaparkan di bawah ini:

Dalam mengimplementasikan kebijakan penggunaan aplikasi Guna Binaan, saya menyusun dan menerapkan langkah-langkah berikut:

1. Membuat perencanaan pengembangan aplikasi Guna Binaan
2. Mengembangkan aplikasi dan melakukan pengujian terhadap aplikasi yang akan digunakan
3. Mengadakan sosialisasi kebijakan penggunaan aplikasi Guna Binaan di Sekolah-sekolah Binaan
4. Membuat grup *whatsapp* yang beranggotakan semua guru binaan sebagai sarana komunikasi antara peran pengawas dan guru binaan dan antar guru binaan
5. Melakukan pendampingan dan memfasilitasi kesulitan guru binaan dalam penggunaan aplikasi Guna Binaan (*helpdesk*)
6. Memberikan umpan balik atas perkembangan penggunaan aplikasi Guna Binaan kepada guru-guru dan sekolah binaan (Wawancara PS 2)

Dampak Implementasi Kebijakan Aplikasi Guna Binaan

Dampak dari implementasi kebijakan ini dapat dilihat secara langsung bahwa guru-guru binaan yang sebelumnya belum mengeksplorasi kemampuan diri dalam mengembangkan perangkat ajar dari mata pelajaran yang diampu, setelah pelaksanaan implementasi kebijakan ini maka guru-guru dibimbing untuk dapat mengeksplorasi kemampuan diri dalam mengembangkan perangkat ajar yang dibutuhkan. Selain itu, melalui kebijakan penggunaan aplikasi Guna Binaan terjalin komunikasi yang kondusif untuk proses peningkatan kompetensi guru binaan melalui program pembinaan oleh peran pengawas sekolah.

Dalam proses implementasi kebijakan ini, peneliti juga mengadakan wawancara terhadap beberapa guru binaan untuk mendapatkan informasi mengenai manfaat yang diperoleh dari kebijakan penggunaan aplikasi Guna Binaan. Hasil dari wawancara tersebut memberikan informasi mengenai manfaat kebijakan penggunaan aplikasi Guna Binaan bagi peran Guru binaan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi guru dalam mengeksplorasi kemampuan diri dalam menyusun perangkat ajar yang dibutuhkan untuk mengajar
2. Memberi fasilitas layanan pembinaan dalam menjalankan tugas mengajar
3. Meningkatkan kemampuan dalam penggunaan teknologi informasi dalam sistem administrasi pendidikan

Hal di atas diperoleh dari data wawancara berikut:

Dampak yang saya alami setelah penerapan kebijakan penggunaan aplikasi Guna Binaan adalah saya lebih mampu menyusun perangkat ajar yang saya gunakan dalam mengajar. Selain itu, saya mendapatkan fasilitas layanan pembinaan dalam menjalankan tugas mengajar (Wawancara GB 1).

Dampak yang saya alami adalah meningkatnya kemampuan dalam menggunakan alat-alat teknologi dalam dunia pendidikan (Wawancara GB 2).

Analisis Implementasi Kebijakan Penggunaan Aplikasi Guna Binaan

Pada bagian ini peneliti menjelaskan analisis implementasi kebijakan penggunaan aplikasi Guna Binaan dalam tugas pembinaan guru oleh pengawas SMP di daerah perbatasan negara Indonesia – Malaysia, Kabupaten Sanggau. Analisis disusun berdasarkan hasil pengumpulan data yang diperoleh dari wawancara dengan informan. Analisis implementasi kebijakan dilakukan berdasarkan teori yang dikemukakan oleh pakar kebijakan pendidikan Charles O. Jones (1979) yaitu bahwa terdapat 5 komponen dalam pengambilan kebijakan pendidikan yaitu: *goal* (tujuan), *plans* (rencana), *programme* (program), *decision* (keputusan), *effects* (dampak). Hasil analisis tersebut dinyatakan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Analisis Implementasi Kebijakan Penggunaan Aplikasi Guna Binaan

Komponen kebijakan pendidikan berdasarkan teori Charles O. Jones	Deskripsi analisis implementasi kebijakan
<i>Goal</i> (tujuan)	<p>Tujuan dari kebijakan penggunaan aplikasi Guna Binaan adalah menjadi solusi mengatasi masalah yang dihadapi pengawas sekolah dalam pelaksanaan tugas kepengawasan dan pembinaan, yaitu banyaknya guru yang belum berusaha mengeksplorasi kemampuannya dalam menyiapkan dan menyusun perangkat pembelajaran. Selain itu cakupan daerah binaan yang sangat luas dan kondisi jalannya kurang kondusif untuk pengawas mengadakan kunjungan ke sekolah-sekolah binaan secara intensif. Hal ini yang mendorong peran pengawas sekolah mengembangkan aplikasi Guna Binaan agar menjadi sarana penunjang pelaksanaan tugas pembinaan.</p>
<i>Plans</i> (rencana)	<p>Dalam menghadapi permasalahan di atas, Pengawas sekolah merencanakan mengembangkan aplikasi sebagai bentuk teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan dalam sistem informasi pendidikan.</p>
<i>Programme</i> (program)	<p>Program yang dibuat oleh Pengawas sekolah sebagai pembuat kebijakan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengadakan sosialisasi kebijakan penggunaan aplikasi Guna Binaan di Sekolah-sekolah Binaan b. Membuat grup <i>whatsapp</i> yang beranggotakan semua guru binaan sebagai sarana komunikasi antara peran pengawas dan guru binaan dan antar guru binaan c. Melakukan pendampingan dan memfasilitasi kesulitan guru binaan dalam penggunaan aplikasi Guna Binaan (<i>helpdesk</i>) d. Memberikan umpan balik atas perkembangan penggunaan aplikasi Guna Binaan kepada guru-guru dan sekolah binaan
<i>Decision</i> (keputusan)	<p>Keputusan yang diambil setelah melakukan proses perencanaan di atas adalah Pengawas sekolah membuat kebijakan untuk semua Guru binaan membuat akun dan menggunakan aplikasi tersebut sebagai sarana pelaksanaan program pembinaan guru.</p>
<i>Effects</i> (dampak)	<p>Dampak dari implementasi kebijakan penggunaan aplikasi Guna Binaan adalah meningkatnya kemampuan guru binaan</p>

dalam mengeksplorasi diri dalam mengembangkan perangkat ajar yang dibutuhkan dalam mengajar.

Lima komponen yang menjadi bagian dari kebijakan di atas membentuk sebuah kebijakan pendidikan yang baik. Kebijakan penggunaan aplikasi Guna Binaan berjalan dengan baik karena berdasarkan analisis di atas, kebijakan ini disusun berdasarkan komponen yang tepat. Kelima komponen tersebut saling berhubungan dan mendukung satu dengan yang lainnya.

SIMPULAN

Kebijakan penggunaan aplikasi Guna Binaan dalam tugas pembinaan guru binaan di daerah perbatasan negara Indonesia – Malaysia, kabupaten Sanggau merupakan salah satu bentuk kebijakan bidang pendidikan. Kebijakan ini dibuat untuk mengatasi masalah nyata yang dihadapi oleh peran Pengawas sekolah dalam menjalankan tugas kedinasannya. Melalui proses analisis yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa kebijakan penggunaan aplikasi Guna Binaan telah berjalan dengan baik karena dilaksanakan sesuai dengan teori kebijakan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan ini diimplementasikan dengan lima komponen yang membentuk sebuah kebijakan pendidikan yang baik yaitu: *goal* (tujuan), *plans* (rencana), *programme* (program), *decision* (keputusan), *effects* (dampak). Kebijakan ini disusun berdasarkan komponen yang tepat. Kelima komponen tersebut saling berhubungan dan mendukung satu dengan yang lainnya.
2. Kebijakan ini menghasilkan dampak yang signifikan yaitu meningkatnya kemampuan guru binaan dalam mengeksplorasi diri dalam mengembangkan perangkat ajar yang dibutuhkan dalam mengajar.

DAFTAR PUSTAKA

- Baharudin, R. (2010). *Keefektifan media belajar berbasis teknologi informasi dan komunikasi*.
- Bakry, A. (2010). Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik. *Jurnal Medtek*.
- Elwijaya, F., Mairina, V., & Gistituati, N. (2021). Konsep dasar kebijakan pendidikan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 67. <https://doi.org/10.29210/3003817000>
- Fatkuroji. (2017). Implementasi Kebijakan Pembelajaran Terpadu dan Minat Pelanggan Pendidikan. *Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan*, 2.
- Nugroho, R. (2008). *Kebijakan Pendidikan yang Unggul, Kasus Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Jemberana*. Pustaka Pelajar.
- Prawiradilaga, D. S. (2013). *Mozaik Teknologi Pendidikan: E-Learning*. Fajar Interpratama Mandiri.

- Rahayu, R., Iskandar, S., & Abidin, Y. (2022). Inovasi Pembelajaran Abad 21 dan Penerapannya di Indonesia. *Jurnal Basicedu*, 6(2), 2099–2104. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i2.2082>
- Risnawan, W. (2015). *Peran dan Fungsi Infrastruktur Politik dalam Pembentukan Kebijakan Publik*. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25157/dinamika.v4i3.1952>
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Alfabeta.
- Sunarminto, B. H. (2015). *Pertanian Terpadu untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional*. Gadjah Mada University Press.
- Sutapa, M. (2008). Kebijakan Pendidikan dalam Perspektif Kebijakan Publik. *Jurnal Manajemen Pendidikan UNY*.
- Wahab, S. A. (2005). *Analisis Kebijakan*. Bumi Aksara.
- Yaumi, M. (2018). *Media dan Teknologi Pembelajaran*. Prenadamedia Group.